

**SKRIPSI**

**INOVASI RUMAH KO-KREASI PELAYANAN PERHUTANAN SOSIAL 4.0  
DIDINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
KABUPATEN BULUKUMBA**



Oleh :

**RITA ASWATI**

Nomor Induk Mahasiswa: 10561112316

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2021**

**SKRIPSI**

**INOVASI RUMAH KO-KREASI PELAYANAN PERHUTANAN SOSIAL 4.0  
DIDINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
KABUPATEN BULUKUMBA**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh  
Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh:

RITA ASWATI

Nomor Stambuk: 105611112316

Kepada

16/09/2021

1 exp  
sumbangan Alumni  
R/0229/ADM/21CD  
Asw  
ii

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2021**

## HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Inovasi Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0 Di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba

Nama Mahasiswa : Rita Aswati

Nomor Induk Mahasiswa : 105611112316

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Pembimbing I

Pembimbing II

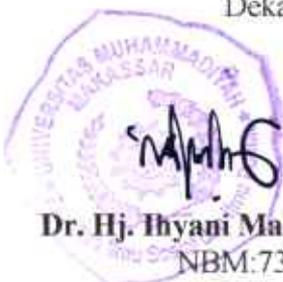
  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.

  
Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, S.T., M.Si.

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi



  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si  
NBM:730727

  
Nasrul Haq, S.Sos, MPA  
NBM: 1067463

## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0192/FSP/A.4-II/VIII/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Senin, 09 Agustus 2021.



### TIM PENILAI

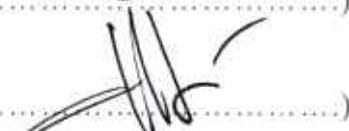
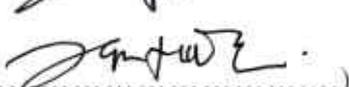
Ketua

Sekretaris

  
**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si**  
NBM: 730727

  
**Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si**  
NBM: 1084366

### PENGUJI:

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si 
2. Dr. H. Muhammad Isa Ansyari, M.Si 
3. Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, S.T., M.Si 
4. Dr. Haerana, S.Sos., M.Pd 

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rita Aswati

Nomor Induk Mahasiswa : 105611112316

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa Skripsi ini dengan judul, Inovasi Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0 Di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba adalah sepenuhnya merupakan karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain, tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas Pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini.

Makassar, 12 September 2021

Yang Menyatakan



Rita Aswati

## ABSTRAK

**RITA ASWATI. Inovasi Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0 Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba**(dibimbing oleh Ihyani Malik dan Hafiz Elfiansyah Parawu).

Rumah Ko-Kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 di Kabupaten Bulukumba merupakan program yang diluncurkan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan yang bekerja sama dengan pemerintah Sulawesi Selatan. Rumah Ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 melibatkan pemuda milenial atau generasi muda yang bertujuan agar mendapatkan dukungan berbagai pihak supaya secara pro-aktif bersama-sama melakukan upaya-upaya kemajuan daerah, meningkatkan pelestarian kekayaan alam dan kesejahteraan warga sebagai inovasi pelayanan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Inovasi Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0 Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif dengan tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan. Analisis data dengan menggunakan model analisa interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inovasi Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0 Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal Berdasarkan indikator: (1) Inovasi Produk, Program Masih kurang dipahami oleh masyarakat disekitar sehingga perlunya peningkatan sosialisasi agar masyarakat dapat paham dan berkontribusi atas program tersebut, (2) Inovasi Layanan, Masyarakat masih berusaha untuk mendukung program tersebut karena belum memahami fungsinya untuk ikut berkontribusi, (3) Inovasi Proses, kelompok petani masih kurang paham fungsi program tersebut sehingga diharapkan sosialisasi tentang program tersebut, dan (4) Inovasi Teknologi,

**Kata Kunci: Inovasi, Rumah Ko-Kreasi, perhutanan sosial 4.0**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Inovasi Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0 Di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan”**. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak.

Skripsi ini adalah tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Sebagai bentuk karya ilmiah.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada orang teristimewa, mereka kedua orang tua tercinta Ayahanda Syaripuddin Tammu dan Ibunda Rampe yang telah rela berkorban tanpa pamrih dalam membesarkan, mendidik serta mendoakan keberhasilan penulis dengan tulus dan ikhlas. Juga kepada sang suami tercinta Rudi Alang S.kep,Ns yang selalu mendampingi dan memberikan motivasi dan semangat untuk terus melanjutkan dan berjuang terus, terima kasih karena sudah sabar bersamaku dan menemani sampai sekarang. Serta kepada beliau orang Tua kedua saya yaitu Om H. Jamaluddin, SH, MH. Dan Tante Dr. Hj. Salma Mursyid, M.HI dan terimakasih juga kepada saudara saudara kakak tercinta saya, Beliau adalah Samad, Sio, Umar, Samo, Isdar, Udding,

Samad, Asse, Imma dan Adik saya Rina, Emmangserta kepada kedua Bapak dan Ibu mertua yang senantiasa dengan ikhlas memberikan dukungan baik berupa moril maupun maeteril, tak lupa iringan doa di setiap sujudnya hingga penulis sampai pada saat seperti ini. Teruntuk sepupuku tersayang Munawira Mampadan sahabatku yang tercinta Nisma, Diana, Juliana, dan Iffah, nawi Terima kasih banyak atas motivasi dan dukungannya selama ini. Tim Ujianku Indasari, Dillah, Bau, Rosita Terima kasih untuk kerja samanya dan motivasinya selama ini untuk berjuang sama mencapai Toga.

Juga pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Hafiz Elfiansyah Parawu, M.Si. selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar dan ikhlas, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., M.PA. selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Segenap Dosen dan seluruh jajaran Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan pengetahuan mulai dari semester awal hingga semester akhir.

6. Teman-teman kelas perjuangan Ilmu Administrasi Negara terima kasih untuk segala cerita, kenangan dan kebersamaan selama ini.
7. Pihak Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melakukan penelitian.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 12 September 2021

Yang menyatakan



Rita Aswati



## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LatarBelakang.....	1
B. RumusanMasalah.....	9
C. TujuanPenelitian.....	9
D. ManfaatPenelitian.....	10
<b>BAB II. LANDASAN TEORI.....</b>	<b>11</b>
A. PenelitianTerdahulu.....	11
B. Konsep dan Teori.....	15
C. Kerangka Pikir.....	30
D. Fokus Penelitian.....	31
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	32
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. WaktudanLokasiPenelitian.....	34
B. JenisdanTipePenelitian.....	34
C. SumberData.....	35
D. InformanPenelitian.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	37
G. Pengabsahan Data.....	38
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	40
B. Hasil Penelitian.....	45
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	58
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah merupakan hal yang patut disoroti karena menyangkut pemenuhan kebutuhan masyarakat yang luas. Salah satunya pemerintah Indonesia. Kenyataannya, pelaksanaan pelayanan publik belum sejalan sesuai yang diinginkan, hal ini menunjukkan oleh laporan Ombudsman Republik Indonesia (2018), melihat bahwa selama kurun waktu 2015-2017 masih didapati laporan sejumlah 33.649 terhadap pelaksanaan pelayanan publik. (Anisa dan Rino, 2019).

Kemajuan teknologi informasi merupakan bagian dari globalisasi yang takterpisahkan dari masyarakat modern seperti saat ini yang telah memberikan tuntutan yang tinggi untuk masyarakat mengenai aparatur sebagai pengelola layanan agar efektif, efisien, dan lebih bersifat terbuka dalam melakukan tugas ke pemerintahannya, agar bisa memberikan kemudahan pada akses informasi terutama informasi tentang pemerintahan. Sehingga mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan sebuah konsep tata pemerintahan baik yang lazim disebut dengan *good governance*.

*E-government* adalah pemanfaatan dan pengguna informasi teknologi oleh pemerintah supaya tercipta komunikasi dengan pemerintah, dunia bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan pelayanan dengan tepat dan cepat. Usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya adalah dengan melengkapi sumber daya fisik serta dalam

pemanfaatan dan penggunaan informasi teknologi oleh aparatur supaya meningkatkan komunikasi antara, masyarakat, dunia bisnis, pemerintah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan agar memberikan pelayanan secara tepat dan cepat. Isu pelayanan publik menjadi isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pemerintah pada berbagai sektor pelayanan khususnya yang berhubungan kebutuhan dasar masyarakat dan pemenuhan hak-hak sipil. (Siti Yulianah M. Yusuf, 2019)

Rumah Ko-Kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 di Kabupaten Bulukumba merupakan program yang diluncurkan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan yang bekerja sama dengan pemerintah Sulawesi Selatan.

Program ini secara umum bertujuan agar mendapatkan dukungan dari pihak agar secara pro-aktif bersama-sama melakukan upaya-upaya kemajuan daerah, meningkatkan pelestarian kekayaan alam dan kesejahteraan warga. Pemerintah Pusat dan Daerah untuk dorongan pemudahan desa, publik, dan milenial yang berkolaborasi berbasis terhadap ekonomi digital, kebudayaan, dan teknologi informasi. Proses ko-kreasi perhutanan sosial 4.0 di dirikan di Sulawesi Selatan melalui serangkaian aktivitas dengan menggunakan cara kerja baru, kerja bareng jemput bola perhutanan sosial 4.0. Di era 4.0, Perhutanan Sosial diarahkan mampu mengawal proses tersebut di atas dengan menjembatani dunia nyata (analog) dan dunia maya (digital). Perhutanan sosial 4.0 akan mendukung kreatifitas, imajinasi serta kolaborasi untuk membawa hasil-hasil dan aktivitas di

kawasan perhutanan sosial ke dunia maya (digital). (Tribunnews.com 26 Agustus 2019).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah Pasal 1 ayat (1) mengartikan Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Sementara Pasal 17, ayat (1) juga mengartikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dapat didokumentasikan oleh penyelenggara Inovasi Daerah agar dapat menilai perkembangan dan pencapaian setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah. Kemudian di ayat (2) disebutkan, selama masa uji coba penyelenggara Inovasi Daerah harus melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan. Untuk inovasi daerah yang gagal atau tidak berhasil mendapat perlindungan pada ayat (3) yang mengartikan, pada uji coba Inovasi Daerah yang gagal, penyelenggara Inovasi Daerah menghentikan penyelenggaraan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan aktivitas atau rangkaian aktivitas untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan untuk setiap masyarakat dan penduduk atas barang jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh pelaksana pelayanan publik. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pasal 3, penetapan kebijakan dan peremusan di bidang pelaksanaan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup agar berlanjut, pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan

kehutanan. Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 188.45.532 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Kolaboratif Kreasi Perhutanan Sosial 4.0 Kabupaten Bulukumba.

Inovasi dalam pelayanan publik dibutuhkan untuk mengubah sikap dan paradigma dari masyarakat itu sendiri. Terdapat berbagai strategi maupun langkah dalam upaya mengubah sikap masyarakat tersebut. Menurut Said (2007), Inovasi merupakan pembaharuan yang diharapkan mampu memperkenalkan teknologi dan penggunaan peralatan baru dalam lingkup kerja di instansi tertentu yang didukung oleh instansi lainnya yang terkait, dan atau perbaikan cara kerja yang lebih berdaya guna dengan mengintegrasikan sumber daya sosial, sumber daya pegawai dan sumber daya kelembagaan. Inovasi dapat membantu sektor publik untuk membuat nilai untuk masyarakat. Sedangkan inovasi dalam Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik serta Kebutuhan Inovasi LAN merupakan proses kreatif menciptakan pengetahuan untuk melakukan penemuan baru yang berbeda dan/atau modifikasi dari yang sudah ada.

Pelayanan publik merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai undang-undang untuk setiap warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh pelaksana pelayanan publik. Pelayanan publik adalah setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah pada sejumlah manusia yang memiliki setiap aktivitas yang menguntungkan dalam kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya terikat pada suatu produk secara fisik (Sinambela, 2010). Sedangkan Menurut

Hardiansyah (2011), Pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik agar memenuhi kebutuhan warga pengguna.

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan pelayanan publik yang merupakan ide-ide kreatif orisinal, pemberdayaan, pembelajaran, serta pengembangan untuk menyebarluaskan ide kreatif orisinal, gagasan dan atau adaptasi/modifikasi guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik agar bisabermanfaat untuk masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Pentingnya inovasi pelayanan publik adalah untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat yang mempunyai, keperluan, kebutuhan dan kepentingan yang merupakan suatu kinerja pemerintah yang paling penting, agar masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya. (PEMERINTAH.NET).

Hasil penelitian Ari Kusuma Wardani (2019), terkait pelayanan publik menunjukkan bahwa: 1.) Pelayanan publik harus berorientasi pada masyarakat dalam memberikan pelayanan yang baik, 2.) Pelayanan publik di era industri 4.0 harus berbasis digital, 3.) Inovasi sangat diperlukan agar setiap penyelenggara pelayanan dapat adaptif dengan segala perubahan, 4.) Pengembangan sumber daya di setiap lembaga pemerintah harus terus dilakukan dan bersifat berkelanjutan, dan 5.) inovasi pelayanan publik berbasis dan berorientasi pada pemanfaatan perkembangan teknologi informasi.

Berdasarkan dari semua uraian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa inovasi pelayanan publik adalah pelaksana atau penyelenggara layanan publik yang bisa membangun dan mendukung suatu kepercayaan masyarakat atau

rakyat untuk setiap inovasi yang telah diciptakan, agar bisa membuat inovasi yang berkelanjutan dan dapat direalisasikan oleh daerah lainnya dengan baik. Peneliti berharap pelayanan publik bisa memberikan inovasi dan menjadi solusi untuk mengefektifkan pelaksanaan atau penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan, karena inovasi pelayanan publik itu sendiri tidak harus menuntut suatu penemuan atau menciptakan hal-hal baru, tetapi merupakan suatu inovasi yang dapat bersifat konseptual untuk menemukan suatu inovasi yang baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Inovasi produk yang dikaitkan dengan inovasi program rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 ini merupakan inovasi baru yang bisa menghadirkan dan memberikan manfaat produk layanan baru, sehingga dapat memajukan serta mengembangkan daerah ini di sektor kehutanan. Inovasi layanan ini berkaitan dengan inovasi rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0, yang memberikan kontribusi sosial dengan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas layanan publik. Inovasi proses pada inovasi rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 ini memberikan proses yang lebih cepat dalam memberikan pelayanan yang baik serta kolaborasi antara petani hutan dengan pemuda milenial dan menunjang perluasan pasar perhutanan sosial melalui berbagai platform digital atau inovasi dengan proses yang lebih mudah dan sederhana. Inovasi teknologi sangat berkaitan dengan program yang diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang dapat meningkatkan kelembagaan dan teknologi informasi untuk pemberian izin akses legal perhutanan sosial yang bisa menghadirkan inovasi teknologi.

Perhutanan Sosial diharapkan memberikan kontribusi sosial, ekonomi dan lingkungan yang berujung pada kesejahteraan dan keadilan sosial. Serta kolaborasi antara petani hutan dan pemuda milenial yang dapat memberikan pelayanan yang baik dan menunjang perluasan pasar Perhutanan Sosial melalui berbagai platform digital atau inovasi. Kenyataannya program ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah dengan dorongan publik, milenial dan pemuda desa untuk berkolaborasi berbasis pada kebudayaan, ekonomi digital dan teknologi informasi. Pada kesempatan ini, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, memberikan bantuan alat produksi antara lain peralatan pengolahan gula aren, budidaya pala, peralatan pembibitan, kopi dan kemiri kepada sejumlah kelompok tani hutan di Provinsi Sulawesi Selatan. (penasulsel.com 25 Agustus 2019 dan Tribunnews.com 26 Agustus 2019).

Terkait dengan inovasi pelayanan publik melalui program rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 di Kabupaten Bulukumba, Pemerintah bersama masyarakat diharapkan bisa optimis dan dapat memajukan serta mengembangkan daerah ini di sektor kehutanan. Dengan adanya kerja sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, meluncurkan Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Mendukung tujuan pembangunan nasional, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, menyediakan 12,7 juta hektare kawasan hutan untuk dikelola secara optimal dan berkelanjutan oleh kelompok-kelompok masyarakat atau badan pengelola perekonomian desa.

Kementrian Lingkungan Hidup Kehutanan meluncurkan Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0, agar mempercepat pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah dan penurunan disparitas antarwilayah, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), meningkatkan kelembagaan dan teknologi informasi dalam pemberian izin akses legal perhutanan sosial. (MEDIAINDONESIA, 25 Agustus 2019).

Pentingnya penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan yang menyangkut dengan proses pelayanan Perhutanan Sosial 4.0 di Kabupaten Bulukumba. Menariknya penelitian ini karena Kementrian Lingkungan Hidup Kehutanan, Milenial meluncurkan Rumah Ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 pertama di Indonesia dan di adakan di bulukumba bersama dengan masyarakat dan melibatkan pemuda milenial atau generasi muda, yang bertujuan agar mendapatkan dukungan berbagai pihak supaya secara pro-aktif bersama-sama melakukan upaya-upaya kemajuan daerah, meningkatkan pelestarian kekayaan alam dan kesejahteraan warga sebagai inovasi pelayanan publik.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah di kemukakan, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul, **“Inovasi Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0 Di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Inovasi Produk Pada Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0 Di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba?
2. Bagaimanakah Inovasi Layanan Pada Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0 Di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba?
3. Bagaimanakah Inovasi Proses Pada Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0 Di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba?
4. Bagaimanakah Inovasi Teknologi Pada Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0 Di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Inovasi Produk Pada Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0 DiDinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba.
2. Untuk mengetahui Inovasi Layanan Pada Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0 Di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba.

3. Untuk mengetahui Inovasi Proses Pada Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0 DiDinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba.
4. Untuk mengetahui Inovasi Teknologi Pada Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0 Di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka manfaat penelitian ini, adalah:

1. Manfaat Teoritis, dari hasil penelitian ini nantinya adalah untuk memberikan sumbangan wawasan keilmuan dan sebagai bahan masukan mengenai pelaksanaan inovasi pelayanan publik melalui program rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 didinas lingkungan hidup dan kehutanan Kabupaten Bulukumba.
2. Manfaat Praktis, diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan kajian ilmu khususnya kajian ilmu administrasi negara, dan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dengan bidang yang sama untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dan tentang sumber daya manusia melalui Inovasi Pelayanan Publik. Terutama untuk mahasiswa program ilmu administrasi negara, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah makassar.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan sekaligus pedoman peneliti. Berikut hasil-hasil penelitian terdahulu yang tidak lepas dari judul Penelitian yaitu, Inovasi Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0 Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba.

**1. Melihat penelitian terdahulu Ari Kusuma Wardani (2019), dalam penelitiannya “Urgensi Inovasi Pelayanan Bidang Administrasi Publik Di Era Disrupsi”.**

Hasil peneliti terdahulu menunjukkan bahwa: 1.) Pelayanan publik harus berorientasi pada masyarakat dalam memberikan pelayanan yang baik, 2.) Pelayanan publik di era industri 4.0 harus berbasis digital, 3.) Inovasi sangat diperlukan agar setiap penyelenggara pelayanan dapat adaptif dengan segala perubahan, 4.) Pengembangan sumber daya di setiap lembaga pemerintah harus terus dilakukan dan bersifat berkelanjutan, dan 5.) inovasi pelayanan publik berbasis dan berorientasi pada pemanfaatan perkembangan teknologi informasi.

**2. Siti Yulianah M. Yusuf (2019), dalam penelitiannya “Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Pada Kantor Pelayanan Bersama Samsat Mataram”.**

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa, Atribut inovasi dari SAMSAT Mataram diantaranya adalah, keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba dan kemudahan diamati. Dan adanya inovasi tersebut diharapkan nantinya bisa meminimalisir maraknya jasa calo, meningkatkan dalam pembayaran PKB sebagai pemasukan PAD dan kemudian bisa meningkatkan kualitas pelayanan prima terhadap masyarakat yang signifikan

pada ranah pelayanan publik agar bisa bermanfaat dengan langsung pada masyarakat. Karena kepuasan masyarakat merupakan kunci keberhasilan sebagai pelaksana pelayanan publik, serta memberikan pelayanan yang lebih baik yang sesuai dengan harapan masyarakat seperti pelayanan yang transparan, akuntabel, cepat, tepat, efektif dan efisien serta mempermudah para wajib pajak dalam pembayaran pajak agar melakukan sistem jaringan interkoneksi dan kemungkinan wajib pajak memberikan transaksi tanpa terikat pada domisilinya di seluruh wilayah.

**3. Hasil Penelitian Anisa Cahyaningrum dan Rino Ardhian Nugroho (2019), dalam penelitiannya “Inovasi Pelayanan Melalui Aplikasi (Dukcapil Dalam Genggaman) Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta”.**

Hasil Penelitian Terdahulu menunjukkan bahwa, Penyelenggara inovasi pelayanan kartu identitas anak melalui aplikasi (Dukcapil dalam genggaman) dari enam tipologi inovasi yang ada, hanya dimensi organisasional pada tipologi proses (organisasional) sistemik yang tidak memenuhi. Hal ini terjadi sebab tidak adanya pembaharuan sebagai struktur organisasi dari dinas terkait. Pada inovasi sistemik, masih adanya kendala jaringan yang didapati dengan penggunaan layanan tersebut. Adanya inovasi pelayanan kartu identitas anak melalui aplikasi (Dukcapil dalam genggaman) dapat mengatasi permasalahan sebelum inovasi ini diciptakan.

Berdasarkan ketiga hasil penelitian terdahulu yang peneliti lampirkan, maka penulis menyimpulkan bahwa inovasi pelayanan publik adalah pelaksana pelayanan publik yang harus mampu membangun dan mendukung kepercayaan

masyarakat pada setiap inovasi yang telah diciptakan, agar bisa berlanjut dan bisa direfleksikan oleh daerah lainnya.

NO	Nama Peneliti	Judul	Kesimpulan	Kesamaan	Perbedaan
1.	<b>Ari Kusuma Wardani (2019)</b>	<i>Urgensi Inovasi Pelayanan Bidang Administrasi Publik Di Era Disrupsi</i>	<p>1.) Pelayanan publik harus berorientasi pada masyarakat dalam memberikan pelayanan yang baik.</p> <p>2.) Pelayanan publik di era industri 4.0 harus berbasis digital.</p> <p>3.) Inovasi sangat diperlukan agar setiap penyelenggara pelayanan dapat adaptif dengan segala perubahan.</p> <p>4.) Pengembangan sumberdaya di setiap lembaga pemerintahan harus terus dilakukan dan bersifat berkelanjutan, dan</p> <p>5.) inovasi pelayanan publik berbasis dan berorientasi pada pemanfaatan perkembangan teknologi informasi.</p>	Pelayanan publik di era industri 4.0 harus berbasis digital	<p>Pada penelitian ini Pelayanan publik di era industri 4.0 berbasis digital dengan produk baru dan layanan kerja yang baru yang di adakan di bulukumba bersama dengan masyarakat dan melibatkan pemuda milenial atau generasi muda. Sedangkan penelitian terdahulu hanya menekankan prinsip digitalisasi.</p>
2.	<b>Siti Yulianah M. Yusuf (2019)</b>	<i>Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Pada Kantor Pelayanan Bersama</i>	Atribut inovasi dari SAMSAT Mataram diantaranya adalah, keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan,	Tujuannya kepada kepuasan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan pelayanan	Penelitian terdahulu masih memperkenalkan model pelayanan berbasis digital, pada penelitian ini sudah

		SamsatMataram	kemungkinan dicob adan kemudahan diamati	nan publik, serta memberik an pelayanan yang lebih baik yang sesuai dengan h arapan masyarakat seperti pelayanan yang transparan, akuntabel, cepat, tepat, efektif dan efisien	menjalankan pelayanan digital namun menggunakan metode yang baru agar sistem pelayanan baik lebih akurat tujuannya.
3.	<b>Anisa Cahyaningrum dan Rino Ardhan Nugroho (2019)</b>	Inovasi Pelayanan Melalui Aplikasi (Dukcapil Dalam Genggam) Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta  Inovasi Pelayanan Melalui Aplikasi (Dukcapil Dalam Genggam) Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta	Penyelenggara inovasi pelayanan kartu identitas anak melalui aplikasi (Dukcapil dalam genggam) dari nama tipologi inovasi yang ada, hanya dimensi organisasional pada tipologi proses (organisasional) sistemik yang tidak memenuhi. Hal ini terjadi sebab tidak adanya pembaharuan sebagai struktur organisasi dari dinas terkait. Pada inovasi sistemik, masih ada kendala jaringan yang didapat dengan penggunaan layanan tersebut.	Sistem Pelayanan digitalisasi yang menggunakan aplikasi	Kendala yang dihadapi pada penelitian terdahulu, masih adanya kendala jaringan yang didapat dengan penggunaan layanan tersebut sedangkan pada penelitian ini kendalanya yaitu masyarakat masih kurang memahami sistem tersebut sehingga perlunya sosialisasi yang lebih progres oleh pemerintah dibantu oleh milenial untuk memahami masyarakat utamanya dikalangan diperkebunan.

## **B. Konsep Dan Teori**

### **1. Teori Pelayanan Publik**

Pelayanan publik merupakan pemberian pelayanan (melayani), keperluan orang lain dan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada kelompok itu sendiri dengan aturan tata cara dan pokok yang sudah ditentukan. Pemerintah pada hakekatnya merupakan pelayanan terhadap masyarakat, dimana tidak hanya bisa melayani dirinya sendiri, tetapi dapat memberikan layanan kepuasan pada masyarakat agar bisa menemukan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dalam meningkatkan kreativitasnya dan kemampuannya demi mendapatkan tujuan bersama. Masyarakat setiap saat ingin mendapatkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas dari birokrat. Hasil penelitian terdahulu Robi Cahyadi Kurniawan (2016) mengatakan, pelayanan publik merupakan suatu tolak ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Dimana masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya. Peningkatan pelayanan publik, kementerian pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi (KemenPAN RB) menerapkan kebijakan bahwa sejak 2014 merupakan tahun inovasi pelayanan publik. Seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah diarahkan agar bisa memberikan suatu ide kreatif atau jawaban pada cara kerja/metode pelayanan publik. Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah aktivitas atau rangkaian aktivitas untuk rangka memenuhi kemauan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan untuk setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa, dan pelayanan administratif yang disiapkan oleh pelaksana pelayanan publik. (Robi Cahyadi Kurniawan, 2016).

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan orang lain melalui aktivitas orang lain yang langsung. Pelayanan juga adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat jasa. Kemudian Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Selain itu, Menurut S. Lukman dan Moenir dalam (Ahmad, 2012:12) Pelayanan merupakan suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Pelayanan menurut Kotler dan Bloom (1984) dalam (Ahmad 2012: 8) adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Kemudian menurut Prasajo (2006:6), pelayanan merupakan respons terhadap kebutuhan manajerial yang hanya akan terpenuhi kalau pengguna jasa itu mendapatkan produk yang mereka inginkan.

Pelayanan publik adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh pihak lain ditujukan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan orang banyak. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan diselenggarakan oleh instansi pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka penyelenggaraan ketentuan peraturan undang-undang. (Diah Nur Fitriana, 2014)

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap masyarakat, diperlukan aturan dalam pelayanan publik. Pelayanan yang diperlukan manusia pada dasarnya merupakan pelayanan fisik yang sifatnya pribadi dan layanan administratif yang biasa didapati pada suatu aktivitas organisasi. Menurut AG.Subarsono(2012), pelayanan publik diartikan dengan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada aparatur publik agar memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna.

Hasil penelitian Ari Kusuma Wardani (2019), terkait pelayanan publik menunjukkan bahwa 1.) Pelayanan publik harus berorientasi pada masyarakat dalam memberikan pelayanan yang baik, 2.) Pelayanan publik di era industri 4.0 harus berbasis digital, 3.) Inovasi sangat diperlukan agar setiap penyelenggara pelayanan dapat adaptif dengan segala perubahan, 4.) Pengembangan sumber daya di setiap lembaga pemerintah harus terus dilakukan dan bersifat berkelanjutan, dan 5.) inovasi pelayanan publik berbasis dan berorientasi pada pemanfaatan perkembangan teknologi informasi.

Pelayanan publik pada umumnya pemerintah melakukan pengaturan terhadap pelayanan jasa dan barang. Pelayanan publik yang berpendidikan atau terpilih berdasarkan manfaatnya juga mengharapkan masyarakat yang aktif. Tugas utama dari setiap instansi pemerintahan adalah memberikan pelayanan atau melaksanakan pelayanan publik supaya terwujud kesejahteraan bagi rakyat. Orang yang membuat sesuatu yang bagus untuk orang lain karena itu adalah seorang pelayan yang melayani bukan dilayani. Pelayanan publik sangat variatif dan

tergantung dari kemampuan masyarakat peningkatannya. Anwaruddin (2004) berpendapat bahwa pelayanan publik dapat didefinisikan dengan segenap kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah agar memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian pelayanan publik merupakan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan para pejabat untuk berbagai lembaga dalam memberikan pelayanan publik untuk publik, baik yang sifatnya langsung maupun yang sifatnya tidak langsung.

Pelayanan publik oleh birokrasi publik adalah salah satu wujud dari tugas aparatur negara sebagai abdi masyarakat dan disamping sebagai abdi negara. Berdasarkan pengertian pelayanan publik yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para pejabat, penyelenggara negara atau pemerintah mulai dari pemerintah pusat sampai kelurahan dan desa, dalam bentuk barang dan jasa yang sifatnya langsung maupun tidak langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pius Nalang, 2013)

Keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor 63 tahun 2003 menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan kebutuhan peraturan perundang-undangan. Peraturan pemerintah No 96 tahun 2012 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap

warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh pelayanan publik.

Inovasi dan pemerintahan memang tidak akan lepas sebagai dua hal yang saling berikatan. Begitu pula dengan pelayanan publik yang tidak lepas dari kualitas pelayanan dan kebijakan. Kebijakan yang memihak kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pelanggan layanan jasa. Masyarakat pun diharapkan dapat diuntungkan dengan adanya kebijakan sebagai payung hukum untuk mengatur dan mengontrol penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurut Robi C.K (2016) menyatakan bahwa Pelayanan publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dengan demikian pelayanan publik diselenggarakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Pelayanan publik juga menjadi indikator keberhasilan dari penyelenggara pelayanan, khususnya lembaga pemerintah dilihat dari segi kinerja. Kinerja menjadi indikator dan penentu keberhasilan dari pemerintah dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan memenuhi aspek kebutuhan layanan dari masyarakat. Birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif, dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam artian meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri (Robi C.K, 2016).

Pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya terikat pada suatu produk secara fisik (Sinambela, 2010).

Menurut Hardiansyah (2011), Pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Sedangkan menurut Pasolong (2007), yang berpendapat bahwa pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan.

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (No.63/KEP/M.PAN/7/2003) tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, prinsip pelayanan publik terdiri dari kesederhaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan serta kenyamanan.

Pengertian pelayanan umum menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) Nomor 81 Tahun 1993 adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara/ Daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Konsep Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan pelayanan publik yang merupakan ide-ide kreatif orisinal, pemberdayaan, pembelajaran, serta pengembangan untuk menyebarkan ide kreatif, gagasan dan atau adaptasi/modifikasi guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

Pelayanan Publik yang menjadi fokus studi Ilmu Administrasi Publik di Indonesia, masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komprehensif. Hipotesis seperti tuntutan pelayanan publik sebagai tanda ketidakpuasan masyarakat dapat dilihat sehari-hari. Harus diakui bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah kepada rakyat mengalami pembaruan, baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan dalam pemerintah itu sendiri. Karena pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan manusia. Hal ini ditegaskan oleh Budiman Rusli bahwa selama hidupnya, manusia membutuhkan pelayanan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa Pelayanan adalah hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah menyuguhkan (orang) dengan makanan atau minuman, menyediakan keperluan orang, mengiyakan, menerima, menggunakan. Sementara itu istilah publik berasal dari bahasa Inggris yaitu Publik yang berarti masyarakat, umum, negara. Kata Publik

sebenarnya sudah menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak, ramai. Menurut Prasojo (2006:6) pelayanan publik adalah suatu upaya membantu atau memberi manfaat kepada publik melalui penyediaan barang dan atau jasa yang diperlukan.

Manajemen pelayanan pada sektor publik adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah yang secara langsung operasional dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah atau badan hukum lain milik pemerintah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, baik pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan tertentu.

Produk-produk pelayanan menurut sifatnya dibedakan ke dalam kategori sebagai berikut :

- a. Produk layanan privat Produk layanan ini memiliki sifat bahwa jika telah dimiliki secara individual, maka si pemilik dapat mencegah individual lain untuk menggunakannya. Namun demikian, untuk memiliki barang layanan ini setiap individu atau institusi harus memperoleh persetujuan dari pemasoknya. Peretujuan ini biasanya dalam bentuk penetapan harga.
- b. Produk layanan publik 10 Produk layanan ini digunakan secara kolektif bagi individual siapa saja yang ingin menggunakan dan tidak menggunakan dan tidak mungkin seorang individu mencegah individu lainnya menggunakan.
- c. Produk layanan yang disediakan oleh negara dan swasta Sektor swasta memiliki peran penting dalam penyediaan produk-produk pelayanan privat

dan saling bersaing dalam penyediaannya menurut selera konsumen. Pemerintah berperan dalam menetapkan persediaan (supply) produk pelayanan yang disediakan sector swasta melalui proses politik (kebijakan publik). namun demikian, terdapat produk pelayanan yang sifatnya privat tetapi dapat disediakan pula oleh negara.

Produk pelayanan dalam manajemen pelayanan terdiri dari barang jasa dan surat berharga yang jabarkan sebagai berikut:

- a. Barang, yaitu suatu barang yang dapat diperoleh dari layanan pihak lain, misalnya transaksi jual beli antara seseorang dengan pihak penjual atau perantara (dapat juga langsung produsen).
- b. Jasa, yaitu suatu hasil yang tidak harus dalam bentuk fisik tak berdimensi, tetapi dapat dinikmati oleh pancaindera dan atau perasaan (gerak, suara, keindahan, kenyamanan, rupa), di samping memang ada yang bentuk fisiknya dituju (kesempurnaan fisik, penampilan, warna, dimensi). Kedua sifat di atas kadang-kadang menyatu, kadang-kadang terpisah dalam arti misalnya produk jasa itu berupa kenikmatan yang berasal dari sesuatu yang berbentuk fisik, maka bentuk fisiknya itu belum tentu dapat dimiliki bahkan memang tidak dimaksudkan untuk dimiliki.

Dalam keputusan Menpan nomor 63/kep/m.pan/7/2003 pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Kemudian menurut Zauhar (2001) dalam Ahmad (2012: 11), pelayanan publik adalah suatu upaya membantu atau

member manfaat kepada publik melalui penyediaan barang dan atau jasa yang diperlukan oleh mereka. Sedangkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Intinya bahwa pada umumnya, pelayanan publik perlu memperhatikan kebutuhan pelanggan maupun citizen sebagai masyarakat yang harus terlayani dengan baik. Pemerintah sebagai penyedia layanan publik dibutuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik.

Inovasi tersebut dapat dipedoman pada PERMENPANRB No.30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.

- a. Tujuan kebijakan inovasi pelayanan publik adalah untuk:
  - 1) Mendorong pembangunan inovasi pelayanan publik,
  - 2) Mendorong pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik,
  - 3) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik,
  - 4) Meningkatkan kepuasan masyarakat.
- b. Kategori inovasi pelayanan publik yaitu:
  - 1) Perbaikan pemberian pelayanan kepada masyarakat (melalui perbaikan standar),
  - 2) Memperkuat partisipasi dalam pembuatan kebijakan melalui mekanisme yang inovatif,

- 3) Mendorong pemerintah berbasis pendekatan kolaboratif dalam era informasi,
- 4) Mendorong responsif gender dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.(PEMERINTAH.NET).

Menurut Mulgan dan Albury dalam Muluk, Mengatakan Bahwa inovasi yang sukses adalah kreasi dan implementasi dari proses, produk, layanan, dan metode pelayanan baru yang merupakan hasil peningkatan nyata dalam efektivitas, efisiensi dan kualitas hasil. Sedangkan menurut Said (2007), Inovasi merupakan pembaharuan yang diharapkan mampu memperkenalkan teknologi dan penggunaan peralatan baru dalam lingkup kerja di instansi tertentu yang didukung oleh instansi lainnya yang terkait, dan atau perbaikan cara kerja yang lebih berdaya guna.

Adapun indikator inovasi pelayanan publik dari hasil elaborasi yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Inovasi produk

- 1) Kehadiran produk layanan baru
- 2) Manfaat produk layanan

b. Inovasi Layanan

- 1) Terjadinya peningkatan kuantitas layanan publik
- 2) Terjadinya peningkatan kualitas layanan publik

c. Inovasi Proses

- 1) Proses lebih cepat
- 2) Proses lebih muda

3) Proses lebih sederhana

d. Inovasi Teknologi

1) Penggunaan *hardware*

2) Penggunaan *software*

### 3. Teori Inovasi

Secara umum Inovasi adalah proses atau hasil pengembangan, pemanfaatan/mobilitas pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang dan jasa), proses, dan sistem yang baru, yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan (terutama ekonomi dan sosial). Inovasi secara sederhana berarti berubah menjadi sesuatu yang baru. Ini seperti pernyataan Muluk (Diah Nur Fitriana, 2014:4) mengenai inovasi yang berarti mengubah sesuatu hal sehingga menjadi sesuatu yang baru. Selanjutnya, Muluk (2008:43) memberikan bahwa inovasi juga adalah instrumen untuk meningkatkan cara-cara baru terhadap menggunakan sumber daya dan memenuhi kebutuhan secara lebih efektif.

#### a. Ciri-ciri Inovasi

Adapun ciri-ciri inovasi, diantaranya yaitu:

- 1) Memiliki kekhasan atau khusus, artinya suatu inovasi memiliki ciri yang khas dalam arti ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan.
- 2) Memiliki ciri atau unsur kebaruan, pada arti suatu inovasi harus memiliki karakteristik terhadap sebuah karya dan buah pemikiran yang memiliki kadar orsinalitas dan kebaruan.

- 3) Dilaksanakan melalui program yang terencana, pada arti bahwa suatu proses inovasi dilakukan melalui suatu proses yang tidak tergesa-gesa, tapi inovasi dipersiapkan dengan matang pada program yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu.
- 4) Memiliki tujuan, program inovasi yang dilakukan untuk memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

Inovasi Menurut Rina Mei Mirnasari (2013), mengartikan didalam pelayanan publik merupakan sebagai prestasi dalam meraih, meningkatkan, memperbaiki efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik yang dihasilkan oleh inisiatif pendekatan metodologi atau alat baru dalam pelayanan masyarakat. Sedangkan menurut Mulgan dan Albury dalam Muluk, mengatakan bahwa inovasi yang sukses adalah kreasi dan implementasi dari proses, produk, layanan, dan metode pelayanan baru yang merupakan hasil peningkatan nyata dalam efisiensi, efektivitas, dan kualitas hasil. (Marten Prasetyo Junior)

#### **4. Konsep Program Rumah Ko-Kreasi**

Rumah Ko-Kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 di Kabupaten Bulukumba merupakan program yang diluncurkan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan yang bekerja sama dengan pemerintah sulawesi selatan. Strategi nasional pemerataan ekonomi dan pembangunan daerah menjadi tulang punggung menuju Indonesia Maju, Berkeadilan dan Inklusif. Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan pembangunan daerah dan penurunan disparitas antar wilayah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meningkatkan

kelembagaan dan teknologi informasi terhadap pemberian izin akses legal perhutanan sosial.

Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 188.45.532 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Kolaboratif Kreasi Perhutanan Sosial 4.0 Kabupaten Bulukumba. Program ini secara umum bertujuan untuk mengumpulkan dukungan beberapa pihak agar bisa pro-aktif bersama-sama melakukan upaya-upaya kemajuan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian kekayaan alam. Pemerintah Pusat dan Daerah dengan dorongan publik, milenial dan pemuda desa yang berkolaborasi berbasis terhadap kebudayaan, ekonomi digital dan teknologi informasi. Proses ko-kreasi perhutanan sosial 4.0 didirikan di Sulawesi Selatan melalui serangkaian aktivitas dengan menggunakan cara kerja baru, kerja bareng jemput bola perhutanan sosial 4.0. Di era 4.0, Perhutanan Sosial diarahkan mampu mengawal proses tersebut di atas dengan menjembatani dunia nyata (analog) dan dunia maya (digital). Perhutanan sosial 4.0 akan mendukung kreatifitas, imaginasi serta kolaborasi agar membawa hasil-hasil dan aktivitas di kawasan perhutanan sosial ke dunia maya (digital). (Tribunnews.com 26 Agustus 2019).

Inovasi produk yang dikaitkan dengan inovasi program rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 ini merupakan inovasi baru yang bisa menghadirkan dan memberikan manfaat produk layanan baru, sehingga dapat memajukan serta mengembangkan daerah ini di sektor kehutanan.

Inovasi layanan ini berkaitan dengan inovasi rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0, yang memberikan kontribusi sosial dengan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas layanan publik.

Inovasi proses pada inovasi rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 ini memberikan proses yang lebih cepat dalam memberikan pelayanan yang baik serta kolaborasi antara petani hutan dengan pemuda milenial dan menunjang perluasan pasar perhutanan sosial melalui berbagai platform digital atau inovasi dengan proses yang lebih mudah dan sederhana.

Inovasi teknologi sangat berkaitan dengan program yang diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang dapat meningkatkan kelembagaan dan teknologi informasi terhadap pemberian izin akses legal perhutanan sosial yang bisa menghadirkan inovasi teknologi. Terkait dengan Inovasi Pelayanan Publik Melalui Program Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0 Di Kabupaten Bulukumba, Pemerintah bersama masyarakat diharapkan bisa optimis dan dapat memajukan serta mengembangkan daerah ini di sektor kehutanan. Dengan adanya kerja sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, menciptakan Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Mendukung tujuan pembangunan nasional, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, mempersiapkan 12,7 juta hektare kawasan hutan agar dikelola dengan optimal dan berkelanjutan oleh kelompok-kelompok masyarakat atau badan pengelola perekonomian desa.

Kementrian Lingkungan Hidup Kehutanan menciptakan Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0, agar mempercepat pembangunan daerah, penurunan disparitas antarwilayah dan pengentasan kemiskinan. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), meningkatkan teknologi informasi dan kelembagaan dalam memberikan izin akses legal pada perhutanan sosial. (MEDIAINONESIA, 25 Agustus 2019).

### **C. Kerangka Pikir**

Penelitian ini dilakukan Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba, untuk mengetahui inovasi produk, inovasi layanan, inovasi proses dan inovasi teknologi yang digunakan dalam penelitian ini untuk di kaitkan dengan inovasi pelayanan publik dalam pelaksanaan inovasi melalui program rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 di dinas kehutanan kabupaten bulukumba. Maka indikator yang diambil pada penelitian ini merupakan indikator hasil elaborasi dari beberapa teori inovasi pelayanan publik. Menurut Mulgan dan Albury dalam Muluk, mengatakan bahwa inovasi yang sukses adalah kreasi dan implementasi dari proses, produk, layanan, dan metode pelayanan baru yang merupakan hasil peningkatan nyata dalam efisiensi, efektivitas, dan kualitas hasil.

Berikut bagan kerangka pikir:



#### D. Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir diatas maka fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dan tinjauan pustaka. Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah dimana melihat Pelaksanaan inovasi Pelayanan publik dengan menggunakan indikator inovasi produk, inovasi layanan, inovasi proses dan

inovasi teknologi melalui program rumah ko-kreasi. Teori yang diambil pada penelitian ini merupakan teori menurut AG.Subarsono(2012), pelayanan publik diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dibuat pada aparatur pemerintah agar memenuhi keinginan warga pengguna. Sedangkan menurut Mulgan dan Albury dalam Muluk, mengatakan bahwa inovasi yang sukses adalah kreasi dan implementasi dari proses, produk, layanan, dan metode pelayanan baru yang merupakan hasil peningkatan nyata dalam efisiensi, efektivitas, dan kualitas hasil. Maka indikator yang diambil pada penelitian ini merupakan indikator hasil elaborasi dari beberapa teori inovasi pelayanan publik yaitu, inovasi produk, inovasi layanan, inovasi proses dan inovasi teknologi.

#### **E. Deskripsi Fokus Penelitian**

Adapun deskripsi fokus penelitian ini, adalah:

1. Inovasi produk yang dikaitkan dengan inovasi program rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial4.0 ini merupakan inovasi baru yang bisa menghadirkan dan memberikan manfaat produk layanan baru, seperti alat produksi antara lain peralatan pengelohan gula aren, budidaya pala, dan peralatan pembibitan. Sehingga dapat memajukan serta mengembangkandaerah ini di sektor kehutanan agar pemerataan ekonomi dan pembangunan daerah dapat mempercepat pengentasan kemiskinan pembangunan daerah dan penurunan disparitas antar wilayah dalam pemberian izin akses legal perhutanan sosial.
2. Inovasi layanan ini berkaitan dengan inovasi rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0, yang memberikan kontribusi sosial dengan adanya

peningkatan kuantitas dan kualitas layanan publik, yang dapat mengembangkan kelembagaan dan teknologi informasi. Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0 dapat dibagikan dan dikreasi bersama untuk berbagai informasi dalam sebuah platform online supaya dapat digunakan oleh perhutanan sosial dan milenial untuk belajar.

3. Inovasi proses pada inovasi rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 ini memberikan proses yang lebih cepat dalam memberikan pelayanan yang baik secara kolaborasi antara petani hutan dengan pemuda milenial dan menunjang perluasan pasar perhutanan sosial melalui berbagai platform digital atau inovasi dengan proses yang lebih mudah dan sederhana. Proses Ko-Kreasi perhutanan sosial 4.0 dibentuk di Sulawesi Selatan melalui serangkaian kegiatan dengan menggunakan cara kerja baru kerja bareng jemput Bola Perhutanan Sosial 4.0. Proses ini merupakan audiensi dengan pimpinan daerah yaitu Bupati Bulukumba.
4. Inovasi teknologi sangat berkaitan dengan program yang diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang dapat meningkatkan kelembagaan dan teknologi informasi untuk pemberian izin akses legal perhutanan sosial yang bisa menghadirkan inovasi teknologi agar pengetahuan yang dibutuhkan dalam pengembangan dunia digital bisa menjadi relevan. Pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan tentang digital marketing, Branding, fotografi dan videografik.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini kurang lebih selama 2 (dua) bulan. Lokasi penelitian berada di dinas lingkungan hidup dan kehutanan Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena peneliti melihat sesuai dengan isu yang diambil mengenai judul yang diangkat yaitu, Inovasi Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0 di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba. Dimana peneliti ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan ini dilakukan.

#### B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis dan tipe penelitian ini yaitu Kualitatif memanfaatkan tipe penelitian deskripsi kualitatif yaitu cara memahami suatu permasalahan yang sedang terjadi. Tipe deskripsi berupa kalimat dengan menggunakan metode ilmiah yaitu wawancara, pengamatan langsung, dan dokumentasi. Penelitian kualitatif ini adalah suatu cara dalam memahami masalah yang berhubungan mengenai Inovasi Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0 di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba.

### **C. Sumber Data**

Sumber data merupakan data yang diperoleh apabila peneliti menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden (orang yang merespon/menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti). Sumber data dari penelitian ini ada 2 (dua), yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informasi yang bersangkutan dengan cara wawancara untuk mendapatkan jawaban yang sama/berkaitan dengan pelaksanaan inovasi pelayanan publik tentang rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari internet atau buku, jurnal, artikel dan skripsi sebelumnya. Data ini juga dikumpulkan dari sumber-sumber yang berkaitan dengan objek penelitian yang berupa laporan, kearsipan, dan catatan mengenai Inovasi pelayanan publik melalui Program rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 Di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba.

### **D. Informan Penelitian**

Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah narasumber/seseorang yang memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang berkaitan langsung dalam penelitian ini atau yang sedang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini dengan judul "Inovasi Rumah Ko-Kreasi Pelayanan

Perhutanan Sosial 4.0 DiDinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba” adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Kehutanan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Ibu Sahriana Said)
2. Seksi peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan (Pak Mulhakkur, S.E)
3. Masyarakat Setempat (Pak Budiarto dan Kamaruddin)

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

##### **1. Observasi**

Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap hasil-hasil proses perencanaan Inovasi rumah ko-kreasi oleh pelayanan perhutanan sosial dan mengamati inovasi pelayanan publik pada program Rumah Ko-Kreasi.

##### **2. Wawancara Mendalam**

Penulis melaksanakan tanya jawab dan tatap muka langsung dengan beberapa informan seperti stakeholder yang dianggap mengetahui dan paham banyak mengenai objek penelitian terkait pelaksanaan inovasi pelayanan publik.

##### **3. Studi Dokumen**

Penulis mengumpulkan, mengidentifikasi dan melakukan telaah pustaka terhadap data-data atau dokumen yang dianggap penting dan mampu memudahkan penelitian sesuai dengan objek penelitian.

## **F. Teknik Analisis Data**

Proses analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

### **1. Reduksi Data**

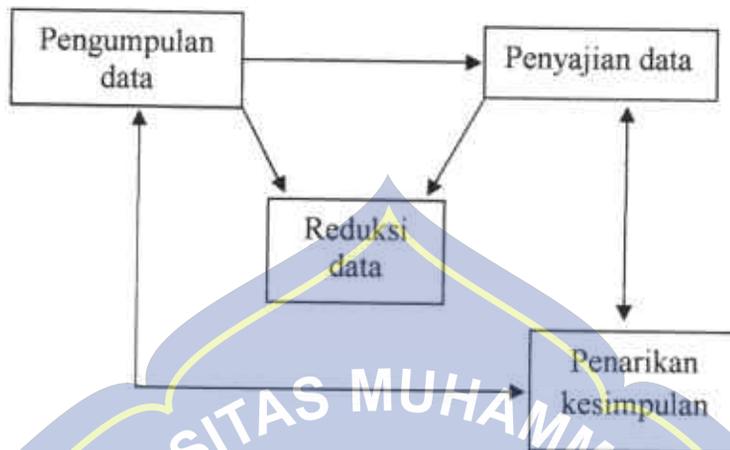
Setelah memperoleh hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang merupakan data mentah dari lapangan, peneliti lalu melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan kegiatan pemilihan data, kemudian data yang dipilih disederhanakan dengan mengambil data yang pokok dan diperlukan yang sesuai dengan objek yang diteliti.

### **2. Penyajian Data**

Setelah data dipilih dan disusun dari hasil reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif. Data yang disajikan merupakan data yang dipakai untuk merespon masalah yang akan diteliti. Setelah data yang dipilih disajikan secara rinci dan sistematis, maka proses selanjutnya yang akan dilakukan adalah membahas data yang telah disajikan.

### **3. Penarikan Kesimpulan**

Setelah data dibahas secara mendalam dan rinci, proses selanjutnya yang dilaksanakan adalah penarikan kesimpulan oleh Peneliti. Hasil dari kesimpulan ini digunakan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.



### G. Pengabsahan Data

Proses pengabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

#### 1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan yaitu peneliti kembali ketempat penelitian, melaksanakan pengamatan kembali, wawancara kembali dengan sumber data yang telah ditemui sebelumnya maupun yang baru. Perpanjangan pengamatan ini dilakukan untuk mengeratkan hubungan antara peneliti dengan informan atau narasumber yang telah ditentukan sehingga terbentuk Rapport, semakin akrab, semakin terbuka dan semakin mempercayai satu sama lain sehingga mampu menggali informasi yang lebih mendalam dan tepat.

#### 2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan yaitu maksanakan penelitian dengan lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan langkah diatas maka kepastian data serta runtutan kejadian akan bisa direkam dengan sistematis dan pasti.

### 3. Triangulasi

Triangulasi merupakan proses pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Sesuai dengan pengertiannya, triangulasi ini terdiri atas tiga proses yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

Triangulasi data dilakukan dengan melakukan pengecekan data dari berbagai sumber.

Triangulasi teknik dilakukan dengan melakukan pengecekan data dengan teknik yang berbeda pada sumber yang sama dan melakukan teknik yang sama dengan sumber yang berbeda.

Triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan pengecekan data dengan wawancara, observasi, atau teknik lain yang sama di waktu yang berbeda dengan kondisi yang berbeda pada narasumber yang sama.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba

###### a. Profil Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu kabupaten yang di provinsi Sulawesi selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,58 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 400.990 jiwa (sensus penduduk tahun 2012). Kabupaten Bulukumba memiliki 10 kecamatan, 27 kelurahan, dan 109 desa (Kabupaten Bulukumba dalam angka 2013). Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82 °C-27,68 °C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Berdasarkan analisis Smith-Ferguson (tipe iklim diukur menurut bulan basah dan bulan kering) maka klasifikasi iklim di Kabupaten Bulukumba termasuk iklim lembap atau agak basah.

Kabupaten Bulukumba berada di sektor timur, musim gadu antara Oktober-Maret dan musim rendengan antara April-September. Terdapat 8 buah stasiun penakar hujan yang tersebar di beberapa kecamatan, yakni: stasiun Bettu, stasiun Bontonyeleng, stasiun Kajang, stasiun Batukaropa, stasiun Tanah Kongkong, stasiun Bonto Bahari, stasiun Bulu-bulu dan stasiun Herlang.

## b. Visi Misi Pemerintah Kabupaten Bulukumba

### 1) Visi

Sejahterahkan masyarakat bulukumba dengan membangun desa menata kota melalui kemandirian lokal yang bernapaskan keagamaan.

### 2) Misi

- a) Memfasilitasi pengembangan kapasitas setiap penduduk bulukumba agar mampu meningkatkan produktivitasnya secara berkesinambungan serta mampu menyalurkan pendapat dan aspirasinya pada semua bidang kehidupan secara bebas dan mandiri.
- b) Mendorong serta memfasilitasi tumbuh-kembangnya kelembagaan masyarakat pada semua bidang kehidupan dengan memberikan perhatian utama kepada pembangunan perekonomian daerah yang memicu pertumbuhan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.
- c) Mengembangkan daerah melalui pemanfaatan potensi dan sumberdaya kabupaten sedemikian rupa, sehingga secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan provinsi sulawesi selatan, serta berdampak positif terhadap pengembangan kawasan sekitar.
- d) Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah yang partisipasi, transparan dan akuntabel.
- e) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya terhadap segenap aspek kehidupan kemasyarakatan.

## 2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten

### Bulukumba

#### a. Profil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mengkoordinasikan Penyelenggaraan kesekretarian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Nama : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba

Alamat : Jl. Dahlia No.2, Caile, Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan 92518

Telpon : (0413)81048

Jumlah Pegawai: 59 Pegawai

Skala Pelayanan: Skala Regional

#### b. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba

##### 1) Tugas

Mempunyai Tugas dan Kewajiban membantu Bupati Kabupaten Bulukumba melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantu dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## 2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan Tugas, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan daerah dibidang Lingkungan hidup dan kehutanan
- b) Pelaksana kebijakan daerah dibidang Lingkungan hidup dan kehutanan
- c) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang Lingkungan hidup dan kehutanan
- d) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dibidang Lingkungan hidup dan kehutanan
- e) Pemantauan pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang Lingkungan hidup dan kehutanan
- f) Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan
- g) Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan bupati

c. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba



## B. Hasil Penelitian

Rumah Ko-Kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 di Kabupaten Bulukumba merupakan program yang diluncurkan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan yang bekerja sama dengan pemerintah sulawesi selatan. Program ini secara umum bertujuan agar mendapatkan dukungan dari pihak agar secara pro-aktif bersama-sama melakukan upaya-upaya kemajuan daerah, meningkatkan pelestarian kekayaan alam dan kesejahteraan warga. Pemerintah Pusat dan Daerah untuk dorongan pemuda desa, publik, dan milenial yang berkolaborasi berbasis terhadap ekonomi digital, kebudayaan, dan teknologi informasi. Proses ko-kreasi perhutanan sosial 4.0 di dirikan di sulawesi selatan melalui serangkaian aktivitas dengan menggunakan cara kerja baru, kerja bareng jemput bola perhutanan sosial 4.0. Di era 4.0, Perhutanan Sosial diarahkan mampu mengawal proses tersebut di atas dengan menjembatani dunia nyata (analog) dan dunia maya (digital). Perhutanan sosial 4.0 akan mendukung kreatifitas, imaginasi serta kolaborasi untuk membawa hasil-hasil dan aktivitas di kawasan perhutanan sosial ke dunia maya (digital).

Secara umum Inovasi adalah proses atau hasil pengembangan, pemanfaatan/mobilitas pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang dan jasa), proses, dan sistem yang baru, yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan (terutama ekonomi dan sosial). Inovasi secara sederhana berarti berubah menjadi sesuatu yang baru. Ini seperti pernyataan Muluk (Diah Nur Fitriana, 2014:4) mengenai inovasi yang berarti mengubah sesuatu hal sehingga

menjadi sesuatu yang baru. Selanjutnya, Muluk (2008:43) memberikan bahwa inovasi juga adalah instrumen untuk meningkatkan cara-cara baru terhadap menggunakan sumber daya dan memenuhi kebutuhan secara lebih efektif.

Adapun indikator inovasi pelayanan publik dari hasil elaborasi yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Inovasi Produk**

Seharusnya mampu memberikan nilai tambah dibanding produk sejenis (keunggulan produk) sehingga dapat menjadikan perusahaan memiliki keunggulan dibandingkan dengan pesaingnya seperti kehadiran produk layanan baru dan manfaat produk layanan.

Inovasi Produk pada program Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0 di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba, dalam hasil wawancara dengan Ibu Sahriana Said selaku Kepala Bidang Kehutanan dan Pelestarian Lingkungan Hidup mengatakan bahwa:

“Inovasi Produk pada Program ini, mereka memberikan keunggulan yang akan memanfaatkan produk baru sebagai pemerataan ekonomi dan pembangunan daerah, seperti alat produksi yaitu peralatan pengolahan gula aren, budidaya pala dan peralatan pembibitan, fungsinya ini di hadirkan supaya dapat mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah.”(Wawancara 13 November 2020)

Inovasi produk yang dikaitkan dengan inovasi program rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 ini merupakan inovasi baru yang dapat menghadirkan dan memberikan manfaat produk layanan baru, seperti alat produksi baru yaitu peralatan pengolahan gula aren, budidaya pala dan peralatan pembibitan. Di mana kita ketahui sebelumnya bahwa pembuatan gula aren sebelumnya itu menggunakan hasil cetakan yang terbuat dari batok kelapa. Hal

tersebut sesuai dengan observasi yang terjadi dilapangan peneliti amati dapat menghadirkan dan memberikan manfaat produk layanan baru, seperti alat produksi baru yaitu peralatan pengolahan gula aren, budidaya pala dan peralatan pembibitan.

Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Pak Mulhakkur, SE sebagai Kepala seksi peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan, mengatakan:

“Untuk program yang baru kami munculkan ini kami target bisa mengubah yang lama dengan cara baru sehingga masyarakat yang ada disekitar tidak ketinggalan tentang pelayanan dan merasakan manfaatnya sehingga target kami disetiap tahunnya mampu mengajukan izin berkelompok.”(Hasil Wawancara 13 November 2020).

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa inovasi program rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 ini mempunyai target setiap tahunnya agar masyarakat disekitar hutan tidak ketinggalan atas pelayanan pemberian izin dan harapannya akurasi setiap tahun dapat meningkatkan masyarakat untuk mengajukan izin berkelompok sesuai dengan tujuan program tersebut. Hal tersebut belum sesuai dengan observasi yang terjadi dilapangan peneliti amati karena masih ketinggalan atas pelayanan pemberian izin dan harapannya akurasi setiap tahun dapat meningkatkan masyarakat untuk mengajukan izin berkelompok

Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan pak Budianto Masyarakat, mengatakan :

“Ini pemerintah ada kebijakan barunya memang tapi masih kurang dipahami oleh masyarakat, masih kurang penjelasannya dimasyarakat. Memang pernah ada sosialisasi tapi tidak rutin sehingga kami disini masyarakat

masih kurang memperdulikan apa yang dimau pemerintah bilang didukung apa.” (Hasil Wawancara 16 November 2020).

Berdasarkan tanggapan informan diatas berkaitan dengan indikator Inovasi Produk dapat dipahami terkait dengan inovasi program rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 ini masih kurang dipahami oleh masyarakat disekitar sehingga perlunya peningkatan sosialisasi agar masyarakat dapat pahan dan berkontribusi atas program yang diberikan supaya dapat dipahami apa tujuan program tersebut oleh masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan observasi yang terjadi dilapangan peneliti amati.

Hal yang serupa juga disampaikan dengan pak Kamaruddin sebagai Masyarakat , mengatakan :

“Program pelayanan izin hutan memang ada baru sebagian tapi tidak pernah ada sosialisasi dari pemerintah semenjak ada di bilang bapak corona sehingga masyarakat dan sebagian lagi belum dipahami oleh masyarakat jadi kita disini belum bisa terlalu paham apa itu sebenarnya programnya. Tapi mungkin ini karena adanya covid 19 dek, sebenarnya yang dilakukan pemerintah kalau dipikir itu bagus untuk kami.” (Hasil Wawancara 16 November 2020).

Dari hasil wawancara informan diatas terkait dengan inovasi program rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 dapat dipahami bahwa perlunya sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat yang ada disekitar hutan agar program tersebut dapat berjalan sesuai tujuannya dengan kontribusi dan partisipasi masyarakat yang selalu mendukung kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan observasi yang terjadi dilapangan peneliti amati masih perlunya sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat yang ada disekitar hutan agar program tersebut dapat berjalan sesuai tujuannya.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator terkait inovasi produk dengan inovasi program rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 merupakan inovasi baru yang dapat menghadirkan dan memberikan manfaat produk layanan baru. Dimana Program ini bisa memberikan keunggulan yang memanfaatkan produk baru sebagai pemerataan ekonomi dan pembangunan daerah supaya mampu mengajukan izin berkelompok yang akan memajukan dan mengembangkan daerah ini dalam pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Inovasi program rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 ini mempunyai target setiap tahunnya agar masyarakat disekitar hutan tidak ketinggalan atas pelayanan pemberian izin dan harapannya akurasi setiap tahun dapat meningkatkan masyarakat untuk mengajukan izin berkelompok sesuai dengan tujuan program tersebut. Program Masih ini juga masih kurang dipahami oleh masyarakat disekitar sehingga perlunya peningkatan sosialisasi agar masyarakat dapat pahami dan berkontribusi atas program yang diberikan dan dapat di pahami oleh masyarakat apa tujuan program tersebut.

## **2. Inovasi Layanan**

merupakan sesuatu yang berisi konsep-konsep baru dan produksi, pengembangan agar mampu meningkatkan kuantitas layanan publik dan kualitas layanan publik dan kontribusi sosial.

“Pada program ini diharapkan dapat melaksanakan layanan pemasaran digital, pemanfaatan market place, pembuatan aplikasi, serta ajang belajar bersama. Rumahko-kreasi hadir untuk menjadi penghubung pengetahuan dan kecerdasan kolektif untuk mengawal kelanjutan kawasan perhutanan sosial bersama masyarakat dan generasi muda/ milenial.”

Inovasi Layanan pada inovasi rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 ini bahwa pada program Rumah ko-kreasi dapat memberikan pelayanan baru seperti layanan pemasaran digital, pemanfaatan Market Place, pembuatan aplikasi, serta ajang pembelajaran bersama yang akan menjadi penghubung pengetahuan dan kecerdasan kolektif dalam mengawal kelanjutan kawasan perhutanan sosial bersama masyarakat dan generasi muda milenial. Hal tersebut sesuai dengan observasi yang terjadi dilapangan peneliti amati bahwa program Rumah ko-kreasi dapat memberikan pelayanan baru seperti layanan pemasaran digital, pemanfaatan Market Place, pembuatan aplikasi, serta ajang pembelajaran bersama.

Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Pak Mulhakkur, SE sebagai Kepala seksi peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan, mengatakan :

“Pada program ini kami diberikan tanggung jawab untuk memberi kontribusi pelayanan yang berbeda dengan memberi pemahaman kepada masyarakat dengan menempuh jalur sosialisasi atas program ini sehingga dapat berjalan sesuai tujuannya.” (Hasil Wawancara 13 November 2020).

Hasil wawancara informan diatas terkait dengan inovasi Layanan rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 ini bahwa pemberian layanan yang berbeda dengan cara lama dengan memberi pemahaman kepada masyarakat dengan bersosialisasi atas program tersebut sehingga masyarakat dapat paham dan program tersebut berjalan sesuai dengan tujuannya.

Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan pak Budianto Masyarakat , mengatakan :

“pemberian pelayanan memang kalau disana adaji kayak mengurus perizinan tetapi kalau ini program yang najalankan masih kurang sosialisasi makanya banyak disekitar sini kurang paham dan adaji juga iya yang paham sebagian.” (Hasil Wawancara 16 November 2020).

Hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan inovasi program Layanan rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 bahwa pemberian pelayanan sosialisasi terkait program rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan masih kurang dipahami oleh masyarakat disekitar hutan sehingga perlunya sosialisasi komprehensif sehingga masyarakat dapat mendukung kebijakan tersebut dsan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya .

Kemudian hasil wawancara berikutnya dengan pak Kamaruddin sebagai Masyarakat , mengatakan:

“Kita masih berusaha untuk paham terkait pelayanan perizinan dengan program ini karena masih belajar untuk ikut apa maunya pemerintah.” (Hasil Wawancara 16 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator Inovasi rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 ini bahwa masyarakat masih berusaha untuk mendukung program tersebut karena belum memahami fungsinya untuk ikut berkontribusi tercapainya program rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator inovasi Layanan rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 menggunakan cara kerja baru yaitu layanan kerja bareng jemput bola perhutanan sosial dengan maksud pelatihan pelayanan akses legal dengan jemput bola kesasaran desa-desa dalam membangun perhutanan sosial secara keseluruhan. Pemberian pelayanan

sosialisasi terkait program rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan masih kurang dipahami oleh masyarakat disekitar hutan sehingga perlunya sosialisasi komprehensif sehingga masyarakat dapat mendukung kebijakan tersebut dan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Masyarakat masih berusaha untuk mendukung program tersebut karena belum memahami fungsinya untuk ikut berkontribusi tercapainya program rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0.

### 3. Inovasi Proses

Inovasi proses adalah menyediakan sarana untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kerja untuk proses yang lebih cepat, lebih muda dan lebih sederhana.

“kami menggunakan cara kerja baru yaitu kerja bareng jemput bola perhutanan sosial. Maksudnya coaching clinic atau pelatihan pelayanan akses legal perhutanan sosial jemput bola dengan pelayanan akses legal perhutanan sosial 4.0 yang sasaranya ke desa-desa dalam membangun perhutanan sosial secara keseluruhan. Proses yang kami lakukan ini agar mampu menjembatani dunia nyata dan dunia maya berupa digital agar mampu mendorong kreatifitas, imaginasi dan kolaborasi.”

Inovasi layanan ini berkaitan dengan inovasi rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 dapat dipahami bahwa dalam program tersebut menggunakan cara kerja baru yaitu layanan kerja bareng jemput bola perhutanan sosial dengan maksud pelatihan pelayanan akses legal dengan jemput bola kesasaran desa-desa dalam membangun perhutanan sosial secara keseluruhan. Hal tersebut sesuai dengan yang terjadi dilapangan peneliti amati bahwa program tersebut menggunakan cara kerja baru yaitu layanan kerja bareng jemput bola perhutanan sosial.

Sebagai Kepala seksi peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan, mengatakan :

“Untuk kelancaran program ini cara kami itu mengajak pemuda yang aktif disetiap desa yang ada didekat hutan serta petani kebun pada proses pembentukan kelompok dengan harapan yang akurat tentang program ini sehingga memberikan proses pelayanan yang baik dan komunikasi yang baik antara kelompok pemuda dengan petani.”(Hasil Wawancara 13November 2020).

Hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan inovasi proses tentang rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 ini bahwa program ini dapat berjalan dengan sosialisasi untuk mengajak pemuda milenial serta petani kebun pada proses pembentukan kelompok sehingga proses pelayanan antara kelompok dengan kelompok petani dapat berkomunikasi dengan baik. Hal tersebut belum sesuai dengan yang terjadi dilapangan peneliti amati.

Kemudian wawancara berikutnya dengan pak Budianto Masyarakat , mengatakan :

“Kami pernah dikumpulkan dengan saya sendiri perwakilan kelompok pemuda diarahkan tentang informasi pelayanan perizinan berkelompok dan hadir juga petani kebun yang ada disekitar hutan dengan membahas pelayanan perizinan.” (Hasil Wawancara 16 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas terkait dengan inovasi proses tentang Layanan rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 bahwa proses berjalannya program ini telah diberikan sosialisasi dengan pemuda milenial dengan pembahasan pelayanan prizinan berkelompok setiap tahunnya. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan pak Kamaruddin sebagai Masyarakat , mengatakan :

“Saya hadir dan masih kurang paham apa maksudnya itu pemerintah , maunya itu nalaksanakan lagi penjelasan seperti itu 2 atau 3 kali supaya pahamki kodong ini sebagai petani kebun bilang apa maksudnya.” (Hasil Wawancara 16 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator Inovasi Proses rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 ini bahwa kehadiran kelompok dalam proses sosialisasi belum sepenuhnya dipahami tujuan kelompok petani masih kurang paham fungsi program tersebut sehingga diharapkan sosialisasi tentang program tersebut dilakukan sampai masyarakat paham secara komprehensif tujuan program tersebut.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator inovasi Proses tentang rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 program dapat memberikan pelayanan baru seperti layanan pemasaran digital, pemanfaatan Market Place, pembuatan aplikasi, serta ajang pembelajaran bersama yang akan menjadi penghubung pengetahuan dan kecerdasan kolektif dalam mengawal kelanjutan kawasan perhutanan sosial bersama masyarakat dan generasi muda milenial. Program ini dapat berjalan dengan sosialisasi untuk mengajak pemuda milenial serta petani kebun pada proses pembentukan kelompok sehingga proses pelayanan antara kelompok dengan kelompok petani dapat berkomunikasi dengan baik. Proses berjalannya program ini telah diberikan sosialisasi dengan pemuda milenial dengan pembahasan pelayanan prizinan berkelompok setiap tahunnya tetapi kehadiran kelompok petani kebun dalam proses sosialisasi belum sepenuhnya dipahami tujuan, kelompok petani masih kurang paham fungsi program tersebut sehingga diharapkan sosialisasi tentang program tersebut

dilakukan sampai masyarakat paham secara komprehensif tujuan program tersebut.

#### 4. Inovasi Teknologi

Mengubah cara produk yang diproduksi dengan memperkenalkan perubahan teknologi yang di butuhkan dalam pengembangan dunia digital.

“perhutanan sosial diarahkan dapat mengawalnya dengan menjembatani dunia nyata dan dunia maya. Kami disini juga ditekan dalam pengetahuan relevan yang dibutuhkan dalam pengembangan dunia digital. Pengetahuan tersebut yaitu digital marketing, branding, fotografi dan videografi produk termasuk pemanfaatan drone untyuk promosi pemanfaatan alam. Dalam pengetahuan tersebut berbagai informasi dapat dibagikan dan di kreasikan bersama dalam sebuah platform online yang tujuannya pelaku perhutanan sosial dan milenial dapat belajar. Dengan demikian perhutanan sosial yang telah masuk ke era digital dapat memberikan manfaat benefit serta pemasukan yang lebih bagi kesejahteraan rakyat.”

Inovasi teknologi perhutanan sosial diarahkan dapat mengawal atau menjembatani dunia nyata dan dunia maya, pengetahuan relevan yang dibutuhkan dalam pengembangan dunia digital seperti digital marketing, branding, fotografi dan videografi produk termasuk pemanfaatan drone dalam promosi pemanfaatan alam. Informasi dapat dibagikan dan di kreasikan bersama dalam sebuah platform online yang tujuannya pelaku perhutanan sosial dan milenial dapat belajar. Dengan demikian perhutanan sosial yang telah masuk ke era digital dapat memberikan manfaat benefit serta pemasukan yang lebih bagi kesejahteraan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan observasi yang terjadi dilapangan peneliti amati karena dapat mengawal atau menjembatani dunia nyata dan dunia maya, pengetahuan relevan yang dibutuhkan dalam pengembangan dunia digital seperti digital marketing, branding, fotografi dan videografi produk termasuk pemanfaatan drone dalam promosi pemanfaatan alam.

Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan Pak Mulhakkur, SE sebagai Kepala seksi peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan, mengatakan :

“Peningkatan pemahaman teknologi informasi dan komunikasi terhadap pegawai untuk bisa disosialisasikan kemasyarakat pemahaman tersebut terkait pengajuan ataupun pemberian izin akses legal perhutanan yang kami harap dapat merancang ide baru untuk lebih lanjutnya kedepan.” (Hasil Wawancara 13 November 2020)

Hasil wawancara dengan informan diatas terkait dengan inovasi teknologi tentang rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 ini bahwa peningkatan pemahaman teknologi informasi dan komunikasi ditingkatkan agar dapat di sosialisasikan kepada masyarakat terkait pengajuan atau pemberian izin akses legal perhutanan dengan tujuan lebih lanjut dapat menciptakan inovasi baru terkait pelayanan teknologi. Hal tersebut belum sesuai dengan observasi yang terjadi dilapangan peneliti amati karena masih kurangnya peningkatan pemahaman teknologi informasi dan komunikasi ditingkatkan agar dapat di sosialisasikan kepada masyarakat terkait pengajuan atau pemberian izin akses legal perhutanan dengan tujuan lebih lanjut dapat menciptakan inovasi baru terkait pelayanan teknologi.

Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan pak Budianto Masyarakat , mengatakan :

“Kalau teknologi kami masyarakat di arahkan untuk mengakses perizinan lewat internet, mereka bilang pelayanan lebih gampang lewat teknologi tetapi masih banyak kodong masyarakat belum bisa lewat cara itu.” (Hasil Wawancara 16 November 2020)

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas terkait dengan inovasi teknologi tentang Layanan rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 bahwa masyarakat diarahkan untuk mengakses pelayanan perizinan legal perhutanan lewat internet tetapi masih banyaknya masyarakat yang kurang paham cara pelayanan dengan memanfaatkan teknologi. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan pak Kamaruddin sebagai Masyarakat , mengatakan :

“Masyarakat disini ada sebagian yang sudah melakukan tetapi ada juga yang masih sering kesana karena tidak ada komputer dipakai untyuk itu apalagi kita tidak tauki pakai begitu.” (Hasil Wawancara 16 November 2020)

Kemudian hasil wawancara informan diatas berkaitan dengan indikator Inovasi teknologi rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 ini bahwa pelayanan dengan sistem teknologi masih kurang dipahami masyarakat untyuk pemberian dan pengajuan izin legal perhutanan.

Kesimpulan secara keseluruhan berkaitan dengan indikator inovasi teknologi tentang rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 bahwa Inovasi teknologi perhutanan sosial diarahkan dapat mengawal atau menjembatani dunia nyata dan dunia maya, pengetahuan relevan yang dibutuhkan dalam pengembangan dunia digital seperti digital marketing, branding, fotografi dan videografi produk termasuk pemanfaatan drone dalam promosi pemanfaatan alam. Informasi dapat dibagikan dan di kreasikan bersama dalam sebuah platform online yang tujuannya pelaku perhutanan sosial dan milenial dapat belajar. Dengan demikian perhutanan sosial yang telah masuk ke era digital dapat memberikan manfaat benefit serta pemasukan yang lebih bagi kesejahteraan rakyat. Masyarakat diarahkan untuk mengakses pelayanan perizinan legal perhutanan lewat internet

tetapi masih banyaknya masyarakat yang kurang paham cara pelayanan dengan memanfaatkan teknologi, pelayanan dengan sistem teknologi masih kurang dipahami masyarakat untuk pemberian dan pengajuan izin legal perhutanan.

Menurut Mulgan dan Albury dalam Muluk, Mengatakan bahwa inovasi yang sukses adalah kreasi dan implementasi dari proses, produk layanan, dan metode pelayanan baru yang merupakan hasil peningkatan nyata dalam efisiensi, efektivitas, dan kualitas hasil.

Pemerintah bersama masyarakat diharapkan bisa optimis dan dapat memajukan serta mengembangkan daerah ini di sektor kehutanan. Dengan adanya kerja sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, meluncurkan Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Mendukung tujuan pembangunan nasional, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, menyediakan 12,7 juta hektare kawasan hutan untuk dikelola secara optimal dan berkelanjutan oleh kelompok-kelompok masyarakat atau badan pengelola perekonomian desa.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **1. Inovasi Produk**

inovasi program rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 merupakan inovasi baru yang dapat menghadirkan dan memberikan manfaat produk layanan baru. Seperti alat produksi yaitu, peralatan pengolahan gula aren budidaya pala, dan peralatan pembibitan. Inovasi program rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 ini mempunyai target setiap tahunnya agar

masyarakat disekitar hutan tidak ketinggalan atas pelayanan pemberian izin dan harapannya akurasi setiap tahun dapat meningkatkan masyarakat untuk mengajukan izin berkelompok sesuai dengan tujuan program tersebut. Program Masih kurang dipahami oleh masyarakat disekitar sehingga perlunya peningkatan sosialisasi agar masyarakat dapat pahan dan berkontribusi atas program yang diberikan dan dapat diketahui tujuan program tersebut oleh masyarakat. Hal tersebut sesuai yang dikatakan Muluk (2008:43) bahwa inovasi pelayanan instrumen baru untuk meningkatkan cara-cara baru terhadap menggunakan sumber daya dan memenuhi kebutuhan secara lebih efektif.

## **2. Inovasi Layanan**

Proses yang berisi konsep-konsep baru dan produksi, pengembangan dan agar mampu meningkatkan kuantitas layanan publik dan kualitas layanan publik. Program dapat memberikan pelayanan baru seperti layanan pemasaran digital, pemanfaatan Market Place, pembuatan aplikasi, serta ajang pembelajaran bersama yang akan menjadi penghubung pengetahuan dan kecerdasan kolektif dalam mengawal kelanjutan kawasan perhutanan sosial bersama masyarakat dan generasi muda milenial. Pemberian pelayanan sosialisasi terkait program rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan masih kurang dipahami oleh masyarakat disekitar hutan sehingga perlunya sosialisasi komprehensif sehingga masyarakat dapat mendukung kebijakan tersebut dan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Masyarakat masih berusaha untuk mendukung program tersebut karena belum memahami fungsinya untuk ikut berkontribusi tercapainya program rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 yang sesuai dikatakan oleh sesuai yang

dikatakan Muluk (2008:43) dan juga Menurut Robi C.K (2016) menyatakan, bahwa Pelayanan publik adalah pemberian layanan (melayani) dengan metode yang baru pada keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

### 3. Inovasi Proses

Menyediakan sarana untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan menghemat biaya untuk proses yang lebih cepat, lebih muda dan lebih sederhana. Pelayanan perhutanan sosial 4.0 menggunakan cara kerja baru yaitu layanan kerja bareng jemput bola perhutanan sosial dengan maksud pelatihan pelayanan akses legal dengan jemput bola kesasaran desa-desa dalam membangun perhutanan sosial secara keseluruhan. Program ini dapat berjalan dengan sosialisasi untuk mengajak pemuda milenial serta petani kebun pada proses pembentukan kelompok sehingga proses pelayanan antara kelompok dengan kelompok petani dapat berkomunikasi dengan baik. Proses berjalannya program ini telah diberikan sosialisasi dengan pemuda milenial dengan pembahasan pelayanan prizinan berkelompok setiap tahunnya tetapi kehadiran kelompok petani kebun dalam proses sosialisasi belum sepenuhnya dipahami tujuan, kelompok petani masih kurang paham fungsi program tersebut sehingga diharapkan sosialisasi tentang program tersebut dilakukan sampai masyarakat paham secara komprehensif tujuan program tersebut, hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan Sinambela (2010) dan Muluk (2008:43) mengatakan bahwa setiap kegiatan atau proses yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang

menguntungkan dalam kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya terikat pada suatu produk secara fisik

#### **4. Inovasi Teknologi**

Mengubah cara produk yang diproduksi dengan memperkenalkan perubahan teknologi. Inovasi teknologi perhutanan sosial diarahkan dapat mengawal atau menjembatani dunia nyata dan dunia maya, pengetahuan relevan yang dibutuhkan dalam pengembangan dunia digital seperti digital marketing, branding, fotografi dan videografi produk termasuk pemanfaatan drone dalam promosi pemanfaatan alam. Informasi dapat dibagikan dan di kreasikan bersama dalam sebuah platform online yang tujuannya pelaku perhutanan sosial dan milenial dapat belajar. Dengan demikian perhutanan sosial yang telah masuk ke era digital dapat memberikan manfaat benefit serta pemasukan yang lebih bagi kesejahteraan rakyat. Masyarakat diarahkan untuk mengakses pelayanan perizinan legal perhutanan lewat internet tetapi masih banyaknya masyarakat yang kurang paham cara pelayanan dengan memanfaatkan teknologi, pelayanan dengan sistem teknologi masih kurang dipahami masyarakat untuk pemberian dan pengajuan izin legal perhutanan, seperti yang dikatakan Inovasi Menurut Rina Mei Mirnasari (2013) dan Muluk (2008:43) mengatakan dalam pelayanan publik sebagai prestasi dalam meraih, meningkatkan, memperbaiki efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik yang dihasilkan oleh inisiatif pendekatan metodologi atau alat baru dalam pelayanan masyarakat.

Kesulitan serta hambatan dari pemerintah daerah adalah, mereka tidak bisa terjun langsung untuk sosialisasi turun dimasyarakat karena adanya covid 19.

Mereka terhalang sehingga program ini ditunda dan belum terlaksana. Tapi insyaAllah setelah covid ini aman, maka kami akan terjun langsung untuk sosialisasi kembali dan melaksanakan program tersebut dengan inovasi inovasi baru. Begitupun dengan masyarakat hambatanya mereka mengatakan bahwa sebelum diluncurkannya program memang masih banyak masyarakat yang belum mengetahui pasti.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang inovasi rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Bulukumbabelum sepenuhnya terlaksana dengan optimal Berdasarkan indikatorberikut:

1. Inovasi produk yang dikaitkan dengan inovasi program rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 ini merupakan inovasi baru yang dapat menghadirkan dan memberikan manfaat produk layanan baruseperti alat produksi.Program ini juga masih kurang dipahami oleh masyarakat disekitar sehingga perlunya peningkatan sosialisasi agar masyarakat dapat pahan dan berkontribusi atas program yang diberikan dan dapat diketahui tujuan dari program tersebut oleh masyarakat.
2. Inovasi Layanan rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 memberikan kontribusi sosial dengan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas layanan publik yang mampu mengembangkan kelembangaan dan teknologi informasi.
3. Inovasi Proses tentang rumah ko-kreasi pelayanan perhutanan sosial 4.0 dapat memberikan pelayanan baru yang lebih cepat dalam memberikan pelayanan yang baik secara kolaborasi antara petani hutan dengan pemuda milenial dan menunjang perluasan pasar perhutanan sosial dengan proses yang lebih mudah dan sederhana. Proses sosialisasi belum sepenuhnya dipahami tujuan, kelompok petani masih kurang paham fungsi program tersebut sehingga



Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba sesuai dengan tujuannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (25 Agustus 2019). Pertama di Indonesia, KLHK Laumching Rumah Ko-  
Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0 di Bulukumba. *Penasusnel.com*.  
Diperoleh dari: <https://penasusnel.com/>
- Ahmad, Badu. 2012. Buku Ajar Mata Kuliah Manajemen Pelayanan Publik.  
Makassar ----- (2015). Bahan Ajar Mata Kuliah Pelayanan Publik.  
Makassar.
- Cahyaningrum, A., & Nugroho, R.A. (2019). *Inovasi Pelayanan Melalui Aplikasi  
"Dukcapil Dalam Genggaman"* oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kota Surakarta. *PUBLIKAUMA Jurnal Administrasi Negara*,  
Volume 7 (2), halaman 103-115. DOI:  
<http://dx.doi.org/10.31289/piblika.v7i2.2999>.
- Denhardt dan Denhardt. 2013. *Pelayanan Publik Baru : Dari Manajemen Steering  
ke Serving*. Kreasi Wacana: Bantul
- Fitriana, D.N. (2014). *Inovasi Pelayanan Publik BUMN* (Studi Deskriptif tentang  
Inovasi Boarding Pass System dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan  
Kereta Api PT KAI di Stasiun Gubeng Surabaya). *Kebijakan dan  
Manajemen Publik*, Volume 2 (2).
- Junior, M.P. (2016). *Inovasi Pelayanan Publik* (Studi Kasus Perizinan Penanaman  
Modal di BPPT Kota Semarang).
- Kurniawan, R.C. (2016). *Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah*.  
*FIAT JUSTISIA*, Volume 10 (3), Open Access: <http://jurnal.fh.unila.ac>
- Moenir. 2008. *Manajemen Pelayanan Umum*. PT Bumi Aksara : Jakarta

- Muluk, M.R. Khairul. (2008). *Knowledge Management*(Kunci, Sukses Inovasi Pemerintah Daerah). Malang: BayuMedia.
- Nalang, Pius. (2013). *Kepemimpinan Transformasional "konsep, teori dan realitas"*. Makassar:masagena press.
- Sugianto. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Wardani, A.K. (2019). *Urgensi Inovasi Pelayanan Bidang Administrasi Publik Di Era Disrupsi*. Jurnal ilmiah ilmu administrasi negara, Volume 6 (2). Diperoleh dari <http://jurnal.unigal.ac.id/>
- Yusuf, S.Y. (2019). *Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Pada Kantor Pelayanan Bersama Samsat Mataram*. Media Bina Ilmiah, Volume 13 (8), DOI: 10.33758/mbi.v13i8.221.
- Tribunnews. (26 Agustus 2019). KLHK Gaet Milenial Luncurkan Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0. *Tribunnews.com*. Diperoleh dari: <https://m.tribunnews.com/>
- Herlina, L. (25 Agustus 2019). KLHK Luncurkan Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0. *MediaIndonesia*. Diperoleh dari: <https://m.mediaindonesia.com/>
- PEMERINTAH.NET. (04 Desember 2014). Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015. *PEMERINTAH.NET*. Diperoleh dari: <https://pemerintah.net/>
- Sinambella, Lijan Poltak. 2014. *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. PT. Bumi Aksara : Jakarta

WIKIPEDIA. Kabupaten Bulukumba. WIKIPEDIA. Diperoleh dari:  
[id.m.wikipedia.org/](https://id.m.wikipedia.org/)





## DOKUMENTASI



Gambar Struktur Organisasi Kantor DLHK



Wawancara Bersama Ibu Sahriana Said



Wawancara Bersama Pak Mulhakkur, S.E





KEDUA

Tugas Tim sebagaimana diuraikan pada Bab II dan KESATU sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menyusun kebijakan Perburuhan Sosial di Kabupaten Bulukumba;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh kelompok sasaran Perburuhan Sosial;
- c. merumuskan rekomendasi program/kegiatan untuk mewujudkan Perburuhan Sosial dalam Program Perbaikan Daerah atau Lembaga terkait;
- d. melaksanakan dan memantau, menilai, mengartikulasikan dan melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan Perburuhan Sosial kepada Bupati;
- e. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perburuhan Sosial dan
- f. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Bulukumba.

SETIAP...  
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba.

KEPADA...  
Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 6 SEPTEMBER 2019

KABUPATEN BULUKUMBA  
KRIASAPPEWALI

Tembusan:

- 1. Pimpinan DPRD Kabupaten Bulukumba
- 2. Inspektur Kabupaten Bulukumba
- 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba
- 4. Peninggal

Handwritten signature/initials



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA  
 NOMOR 100/2015/2015  
 TANGGAL 25 September 2015  
 TENTANG PEMENTUKAN TIM LOKUS TUGAS KOLABORATIF ERAHIL  
 PERLUTANAN SUBSAL 4.0 KABUPATEN BULUKUMBA

No	Nama/Jabatan	Ketebukan dalam Tim	Kelembagaan
1	Bupati Bulukumba	Pemimpin	
2	Wakil Bupati Bulukumba	Penanggung Jawab	
3	Sekretaris Bupati	Wakil Penanggung Jawab	
4	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba	Ketua	DLHK
5	Sekretaris Bupati	Wakil Ketua	BAPEDA
6	Kepala Bidang kehutanan	Sekretaris	DLHK
7	Kepala Bidang Hutan dan HAM	Wakil Sekretaris	SETDA
8	Kepala Dinas Pengelolaan Hutan Tanaman II Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota	Dinas Kehutanan Prov Sul-Sel
9	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota	Dinas Kehutanan Prov Sul-Sel
10	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perikanan Kabupaten Bulukumba	Anggota	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura & Perikanan Kab. Bulukumba
11	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba	Anggota	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Bulukumba
12	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba	Anggota	Dinas Perikanan Kab. Bulukumba
13	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba	Anggota	Dinas Sosial Kab. Bulukumba
14	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba	Anggota	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bulukumba
15	Kepala Dinas Perdagangan & Perindustrian Kabupaten Bulukumba	Anggota	Dinas Perdagangan & Perindustrian Kab. Bulukumba



PKL

16	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kabupaten Bulukumba	Anggota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Bulukumba
17	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba	Anggota	Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba
18	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba	Anggota	Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Bulukumba
19	Kepala Dinas Kependidikan, Kebudayaan & Pencapaian Sosial Kabupaten Bulukumba	Anggota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba
20	Kepala Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Bulukumba	Anggota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bulukumba
21	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba	Anggota	Dinas Pariwisata Kab. Bulukumba
22	Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba	Anggota	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kab. Bulukumba
23	Kepala Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Bulukumba	Anggota	Dinas Koperasi & UKM Kab. Bulukumba
24	Kepala Bidang Humas dan Protokol Setda	Anggota	SETDA
25	Komunitas Sabtu Keren	Anggota	Komunitas
26	LSM Kartika	Anggota	LSM
27	Koperasi Mitra Jaya	Anggota	SPKS
28	Martani Kahar	Anggota	SPKS
29	Kelompok Usaha Padi Deppaco	Anggota	SPKS
30	Kelompok Petani Organik	Anggota	SPKS
31	Masyarakat Hutan Adat (MHA)	Anggota	SPKS
32	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)	Anggota	SPKS
33	Kelompok Sadar Wisata	Anggota	SPKS
34	Komunitas Swabina Pedesaan Salassae (KSPS)	Anggota	SPKS

BUPATI BULUKUMBA,  
  
 M. SUKRI S. SAPPEWALI









**Universitas  
Muhammadiyah  
Makassar**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
Faculty of Social and Political Sciences

Meneng Raya Lantai 5 - Jalan Sulawesi Utara No. 219 Makassar 90221  
Telp. (0411) 846 972 Fax. (0411) 843 589  
Email: fasil@unismuh.ac.id  
Website: www.unismuh.ac.id

Nomor : 1256/FSP/A.6-VIII/X/1442/H/2020 M  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yth.  
Bapak Rektor, Co. Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh  
Di  
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data  
dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu semoga dapat  
memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Rita Aswati  
Stambuk : 105611112316  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Lokasi Penelitian : Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Kabupaten Bulukumba  
Judul Skripsi : "Inovasi Rumah KO-Kreasi Pelayanan Perhubungan Sosial 4.0  
di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten  
Bulukumba"

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya  
yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziran.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 30 Oktober 2020

Dekan,  
Ub. Wakil Dekan I

  
Dr. Burhanuddin S.Sos., M.Si  
NBM. 1084366



Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia  
Progress for the Nation and Humankind

Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi  
Public Administration - Government Studies - Communication Science



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Abdulrahman No. 229 Gadj. Mada 71212 Makassar 90211 E-mail: [ip3m@umh.ac.id](mailto:ip3m@umh.ac.id)



Nomor 2009/05/C.4-VIII/X/42/2020  
Lamp 1 (satu) Rangkap Proposal  
Hal Permoohonan Izin Penelitian

13 Rabiul awwal 1442 H  
30 October 2020 M

Kepada Yth:  
Bapak / Ibu Bupati Bulukumba  
Cq. Ka. IP3 Bulukumba, Perpustakaan dan Kearsipan  
di -  
Bulukumba

Berdasarkan Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, No. 1256/2020/VIII/X/1442 H tanggal 21 October 2020,  
menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama RITLISWATI  
No. Stambuk 100671112316  
Fakultas Fakultas Sosial dan Politik  
Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Pekerjaan Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian pengumpulan data dalam rangka penelitian Skripsi dengan judul:

"Analisis Fungsi NDB-kanan pelayanan pemerintahan sosial 4.0 di Desa Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 2 Nopember 2020 s.d 2 Januari 2021

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.  
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan, Wassalamullahu khaeran katziirau!

السَّلَامَةُ وَالرَّحْمَةُ وَالْكَرَامَةُ

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.  
NBM 101 7716



# PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Dr. Sutomo No. 4 - Telp. (0413) 85003 Bulukumba 92111

Bulukumba, 02 November 2020

Nomor: 070/277/Kesbangpol/XI/2020  
Sifat: Biasa  
Lampiran: -  
Perihal: Rekomendasi

Kepada:  
Kepala Dinas Perencanaan, Modal dan Pelayanan  
Yogyakarta - atau Pimka Kab. Bulukumba  
di:  
Jalan Karami No. 13 Bulukumba

Berhimpunan Surat Ketua LPJM UNISMA di Makassar Nomor : 009/2020/UNISMA/43/2020 tanggal 10 Oktober 2020 Perihal: Rekomendasi

Dengan ini saya sebagai Kepala Bapuk/Dya/Saudara (i) bahwa yang bersangkutan adalah:

Nama: RITA ANVA  
Tempat, tanggal lahir: Makassar, 03 - 1998  
No. P. : 1112316  
Prodi: Studi Prodi: Ilmu Administrasi Negara  
Jenis Kelamin: Perempuan  
Pendidikan: Mahasiswa UNISMA di Makassar  
Jl. Alauddin, No. 11- Makassar  
Hp: 082 99 319 3643

Bermaksud akan mengajukan Penelitian II Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan Kabupaten Bulukumba dalam rangka Penyelidikan Skripsi dengan judul:

\* INOVASI RUMAH KOKREASI PELAYANAN PERILAKUAN SOSIAL 4.0 DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KESEHATAN KABUPATEN BULUKUMBA

di Makassar, Tanggal: 02 November 2020 s.d. 02 Januari 2021  
Pengkaji/Ases. Team: Hidayat

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka saya mendapatkan Surat Keterangan Penelitian

Permohonan disampaikan kepada saudara untuk diteliti dan bahan diperlukan

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
M. ARIFAN, S.P., M.P.  
Pangkat Pembina Tk. I  
NIP. 19721212 199202 1 001

**Tembusan:**

1. Bupati Bulukumba (sebagai laporan)
2. FKPD Kab. Bulukumba
3. Ketua LPJM UNISMA di Makassar
4. Bertinggal

PEMERINTAH KABUPATEN BUKUMBA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
(DPMPTSP)

Alamat: Jl. Koberi No. 11 Telp. (0411) 81060 Bukumbi 91111

Bukumbi, 02 November 2020

Nomor: ST/2020/SP/0002  
Lampiran: -  
Perihal: Izin Persepsi

Kepada:  
Yth. Bupati Bukumbi  
Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian  
Yth. Kepala Dinas Kesehatan

Sehubungan dengan Surat Keputusan Kepala Kabupaten Bukumbi Nomor  
1007/11/2020 tanggal 02 November 2020 perihal Keputusan Izin  
Persepsi dan Izin Persepsi

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR**

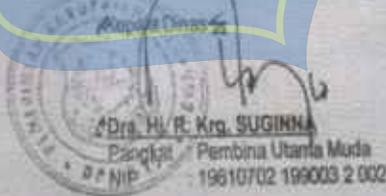
**UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

RITA ASWATI  
196107021990032002  
Program Studi: MANAJEMEN SUMBER MANUSIA  
Majalah: UNISUM MAJALAH  
Alamat: J. ALAUDDIN BULO, MAKASSAR

Sehubungan dengan Persepsi di lingkungan Hidup dan Kesehatan Kabupaten Bukumbi dalam rangka pelaksanaan dengan judul **INOVASI RUMAH KOKREASI PELAYANAN PERNYANTAN SOSIAL AKRIBI DI DAERAH LINGKUNGAN UPT DAN KEHUTANAN KABUPATEN BUKUMBA** yang telah berangkat pada tanggal 02 November s.d 02 Januari 2021

- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan tersebut sebagai berikut:
1. Melakukan semua persiapan, termasuk - termasuk yang berbau dan memindahkan ke lokasi yang telah ditentukan sebelumnya
  2. Tidak mengganggu ketertarikan dan kenyamanan masyarakat
  3. Tidak mengambil dana yang merugikan dari izin yang diberikan
- Mohon hasil pelaksanaan yang bersangkutan dalam surat menyurat (surat) diserahkan kepada Kepala Bupati Bukumbi, Kepala Kantor Kesehatan Bangsa dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian
- Demikian surat ini dibuat, dan dapat dipetik bila ada yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan sebagaimana tersebut diatas, atau dengan alasan lain yang telah ditetapkan kegiatan tersebut/bengunan, maka dimaklumi dengan segera.

Demikian surat ini dibuat untuk dipatuhi, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

  
Dra. H/ R. Krg. SUGINHA  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
19610702 199003 2 002

- Tembusan:
1. Bupati Bukumbi di Bukumbi (sebagai laporan)
  2. Kepala Kecamatan Kab. Bukumbi di Bukumbi
  3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
Jl. Dabba No. 2 Telp (0413) 80048 Bulukumba 92312

SURAT KETERANGAN

Demikian Surat Dekan Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 1256/151/S.B-VIII/2014/2020 M tanggal 30 Oktober 2020 perihal Pendaftaran Peserta Penelitian, maka dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa

Nama: **Rita Azzahra**  
Nim: **19112116**  
Jurusan: **Manajemen**

Telah melaksanakan Penelitian & Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba yang terhitung mulai tanggal 2 November 2020 sampai 2 Januari 2021 dengan judul **Inovasi Usaha AP-Kreatif Pelayanan Perikanan Sosial dan Kearifan Kabupaten Bulukumba**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk di pertanggung jawabannya masing-masing.

Dinas,  
Kabupaten Bulukumba  
19600111198111003



## RIWAYAT HIDUP



Rita Aswati. Dilahirkan di Kajang pada tanggal 04 Maret 1998. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan ayahanda Syaripuddin Tammu dan Ibunda Rampe.

Pada Tahun 2006 penulis memasuki sekolah dasar di SDN 215 Dassa dan Lulus ditahun 2010 kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di SMPN 20 Bulukumba pada tahun 2013. Pada Tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah menengah atas di SMAN 5 Bulukumba dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis lulus seleksi masuk Program Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Dengan nekat yang kuat dan motivasi dari orang-orang sekitar untuk berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Negara. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Inovasi Rumah Ko-Kreasi Pelayanan Perhutanan Sosial 4.0 Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba”**